

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara dan umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pengukuran yang menggunakan nilai PDB sebagai indikator dinilai kurang efektif dikarenakan tidak seluruh kegiatan dalam perekonomian tercakup dalam perhitungan PDB. Akibatnya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDB belum sepenuhnya mempresentasikan kondisi perekonomian suatu negara dan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang di ambil pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, tetapi tidak masuk dalam perhitungan PDB karena berlangsung di luar sistem pencatatan resmi. Aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam perhitungan PDB tersebut dikenal sebagai *shadow economy* (Schneider & Enste, 2000b).

Shadow economy telah menjadi permasalahan yang serius dengan berbagai dimensi pada seluruh kelompok negara, baik negara maju maupun negara berkembang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi (Bayar & Ozturk, 2016). Perilaku yang mencerminkan *shadow economy* dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik pada kelompok menengah ke bawah maupun menengah ke atas. *Shadow economy* dikenal dengan berbagai istilah lain seperti *underground economy*, *informal economy*, *unofficial economy*, dan *black market economy*.

Istilah *shadow economy* telah banyak didefinisikan oleh para peneliti dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Schneider dan Enste (2000b) mendefinisikan seluruh aktivitas yang tidak tercatat dalam sistem yang resmi sehingga tidak termasuk dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB) disebut *shadow economy*. *Shadow economy* mencakup seluruh transaksi, baik yang dilakukan secara moneter maupun barter, untuk barang legal maupun ilegal, baik dikenakan pajak atau tidak, tetapi tidak tercatat dalam PDB (Smith, 1994). Menurut Samuda (2016), *shadow economy* adalah aktivitas ekonomi legal maupun ilegal yang tidak dilaporkan kepada otoritas pemerintah. Aktivitas tersebut dapat berupa usaha yang tidak terdaftar, perdagangan informal, tenaga kerja tidak tercatat, penghindaran pajak, hingga transaksi ilegal. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *shadow economy* merupakan seluruh aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, baik legal maupun ilegal, tetapi tidak dilaporkan kepada otoritas resmi sehingga tidak tercatat dalam perhitungan PDB. Karakteristik utama *shadow economy* adalah rendahnya tingkat transparansi aktivitas ekonomi sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mengawasi, mengukur, dan merumuskan kebijakan ekonomi secara tepat.

Perkembangan *shadow economy* tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, kelembagaan, dan social. Faktor tersebut seperti tingginya beban pajak, dan kontribusi jaminan sosial, pembatasan jam kerja, tingginya tingkat pengangguran, dan menurunnya kualitas kebijakan sipil (Schneider & Enste, 2000b). Berkembangnya *shadow economy* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi negara, seperti berkurangnya penerimaan negara, menurunnya efektivitas pada kebijakan fiskal dan moneter, dan memengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan

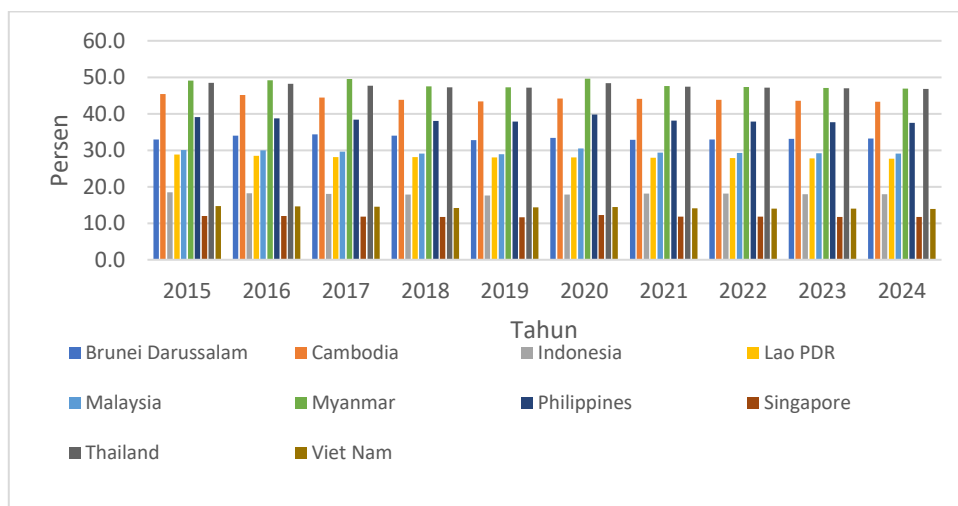
(Rezky, 2020). Selain itu, tingginya *shadow economy* juga dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, menghambat investasi, serta menurunkan kualitas kelembagaan ekonomi suatu negara (Berdiev & Saunoris, 2016). Singh et al. (2012), bahkan menegaskan bahwa dampak *shadow economy* dapat menimbulkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, pengendalian *shadow economy* menjadi salah satu tantangan penting bagi setiap negara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan didukung oleh sistem ekonomi formal. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa besarnya *shadow economy* masih menjadi persoalan global yang memerlukan perhatian serius, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Fenomena *shadow economy* menunjukkan perbedaan antar negara maju dan berkembang. Hasil penelitian Schneider et al. (2010) dalam memperkirakan tingkat *shadow economy* di 162 negara menunjukkan ukuran *shadow economy* di negara maju berkisar 8 hingga 15 persen dari PDB, sedangkan di negara berkembang mencapai 30 hingga 45 persen dari PDB. Semakin besarnya ukuran *shadow economy* dapat mengurangi basis penerimaan pajak, menurunkan kualitas kelembagaan ekonomi, dan menghambat efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Baklouti & Boujelbene, 2020). Oleh karena itu, pengendalian *shadow economy* tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi global.

Salah satu kawasan negara berkembang yang relevan untuk mengkaji fenomena *shadow economy* adalah ASEAN. ASEAN merupakan kawasan yang tingkat pembangunan ekonomi, kualitas kelembagaan, dan struktur perekonomian

yang beragam. Selain itu, sejak diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015, integrasi ekonomi di kawasan ASEAN semakin meningkat melalui perluasan perdagangan, investasi, dan mobilitas faktor produksi antarnegara (ASEAN Secretariat, 2015). Integrasi tersebut mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan dalam menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam sektor formal. Perbedaan karakteristik ekonomi di masing-masing negara anggota menyebabkan tingkat *shadow economy* di kawasan ASEAN juga bervariasi. Oleh karena itu, ASEAN menjadi kawasan yang relevan untuk mengkaji fenomena *shadow economy*

Kondisi tersebut didukung oleh masih besarnya ukuran *shadow economy* di kawasan ASEAN. Penelitian yang dilakukan Vo dan Ly (2014), menunjukkan adanya perbedaan ukuran *shadow economy* antarnegara ASEAN yang diperkirakan mencapai sekitar 20 persen hingga 50 persen dari aktivitas ekonomi formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *shadow economy* masih memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan *shadow economy* di kawasan ASEAN sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: World Bank, 2024

Gambar 1. 1 Shadow economy di Negara ASEAN Tahun 2015-2024

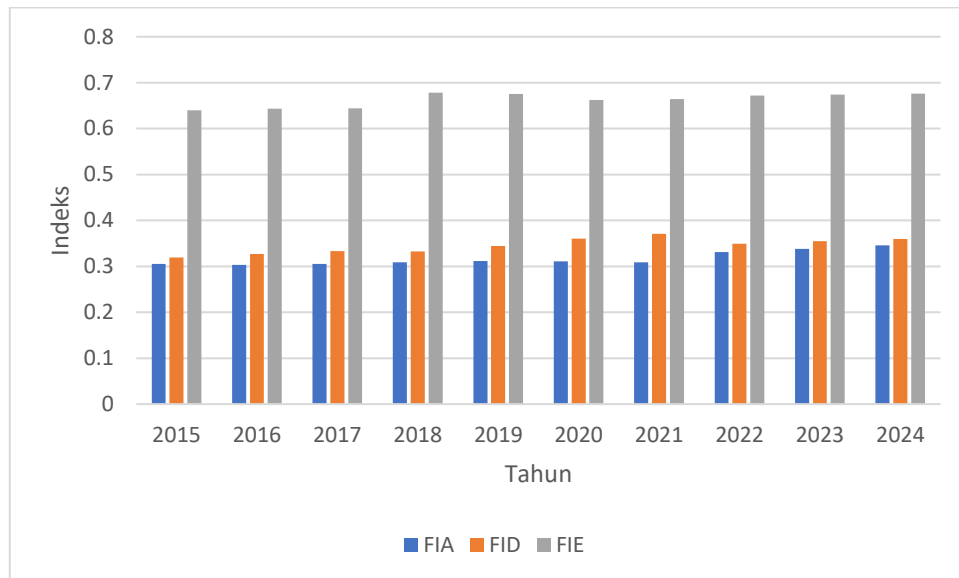
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat *shadow economy* di negara ASEAN masih cukup tinggi dan bervariasi selama periode 2015 hingga 2024. Sebagian negara ASEAN memiliki tingkat *shadow economy* yang relatif tinggi, sedangkan beberapa negara lainnya berada pada tingkat yang lebih rendah. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya variasi struktur ekonomi, kualitas kelembagaan, dan perkembangan sektor keuangan di masing-masing negara (Schneider & Klinglmaier, 2005). Selain itu, penurunan *shadow economy* di sebagian negara ASEAN masih relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa *shadow economy* masih menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih formal, inklusif, dan terintegrasi (Berdiev & Saunoris, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian *shadow economy* tidak cukup hanya melalui kebijakan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi formal. Salah satu instrumen yang dinilai memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan tersebut adalah pembangunan sektor keuangan (*financial development*), karena sistem keuangan yang berkembang mampu meningkatkan akses masyarakat

terhadap layanan keuangan formal, memperluas intermediasi keuangan, serta mendorong aktivitas ekonomi menjadi lebih terdokumentasi dan transparan.

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap *shadow economy* adalah pembangunan keuangan (*financial development*). Pembangunan keuangan merupakan proses peningkatan efisiensi, kedalaman, aksesibilitas, dan stabilitas sistem keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi (Svirydzenka, 2016). Menurut Huang (2006), pembangunan keuangan adalah peningkatan efisiensi dalam alokasi sumber daya keuangan dan pengawasan terhadap proyek modal melalui persaingan yang lebih baik dan perkembangan sistem keuangan. Pembangunan keuangan yang lebih baik mampu mempercepat aliran modal, mengintegrasikan berbagai sumber daya ekonomi, serta meningkatkan efisiensi alokasi dana ke berbagai sektor produktif sehingga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efektivitas aktivitas ekonomi (Elfaki et al., 2021).

Sistem keuangan yang berkembang dengan baik juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, memperluas penyaluran kredit, dan meningkatkan efisiensi alokasi dana pada sektor produktif. Menurut T. Beck & Demirgüç-Kunt (2008) akses terhadap lembaga keuangan formal dapat mendorong pelaku ekonomi beralih dari sektor informal menuju sektor formal dikarenakan adanya kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, sistem pembayaran, dan layanan keuangan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Capasso dan Jappelli (2013a) menemukan bahwa perkembangan sektor keuangan dapat mengurangi *shadow economy* melalui penurunan biaya kredit dan peningkatan transparansi aktivitas ekonomi. Dengan semakin berkembangnya sektor keuangan, maka pelaku usaha akan lebih terdorong untuk beroperasi

secara formal guna memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih luas.



Sumber: International Monetary Fund (IMF), 2025

Gambar 1. 2 Perkembangan Rata-rata Sub-indeks Pembangunan Keuangan di Negara ASEAN Tahun 2015-2024

Pembangunan keuangan di negara ASEAN dapat dilihat melalui tiga dimensi utama yakni akses lembaga keuangan, kedalaman lembaga keuangan, dan efisiensi lembaga keuangan sebagaimana data statistiknya ditunjukkan pada gambar 1.2 diatas.

Gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa rata-rata dari sub-indeks pembangunan keuangan yang paling tertinggi merupakan sub-indek efisiensi lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan di ASEAN relati efisien dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (Konstantakopoulou, 2023). Sementara itu, kedalaman lembaga keuangan menunjukkan kecenderungan meningkat yang mencerminkan semakin berkembangnya penyaluran kredit dan pembiayaan dalam sistem keuangan (Hidayat et al., 2025). Namun, akses lembaga keuangan masih

berada pada tingkat yang relatif rendah, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat ASEAN masih memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal (Mbona, 2022). Rendahnya akses keuangan dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, serta belum meratanya distribusi layanan keuangan diberbagai wilayah (Setiawan, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya pembangunan keuangan masih menjadi isu yang penting dalam upaya mengurangi *shadow economy*.

Isu pembangunan keuangan yang diasumsikan dapat mengurangi *shadow economy* telah dibahas oleh beberapa peneliti. Menurut Afful, Bentum-Ennin, et al. (2025) menyatakan bahwa pembangunan keuangan terhadap *shadow economy* memberikan dampak negatif secara jangka panjang yang dimana sektor pembangunan keuangan dapat mengurangi *shadow economy* dan beralih pada aktivitas ekonomi formal. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Esaku dan Mugoda (2024) menyatakan bahwa pembangunan keuangan dapat mengurangi *shadow economy* dalam jangka pendek dan panjang. Pada penelitian yang dilakukan Onwuka dan Ayeni (2023) juga menunjukkan bahwa hubungan pembangunan keuangan dengan menggunakan tiga indikator keuangan yakni akses, kedalaman dan efisiensi lembaga keuangan terhadap *shadow economy* berhubungan negatif. Sedangkan hasil penelitian Canh dan Thanh (2020) menyatakan bahwa pembangunan keuangan berdampak signifikan terhadap *shadow economy*, akan tetapi hubungan dengan pengecualian efisiensi lembaga keuangan menunjuk pada model teoritis U terbalik yang dimana akses dan kedalaman keuangan dalam jangka pendek memiliki hubungan positif yang signifikan dan dalam jangka panjang lembaga keuangan dapat mengurangi *shadow economy* yaitu berdampak negatif signifikan. Hasil penelitian dari Safuan et al. (2021) juga menyatakan

bahwa pembangunan keuangan dan *shadow economy* memiliki hubungan nonlinear yang berbentuk U terbalik dalam jangka panjang di negara Indonesia. Menurut Abu-Lila et al. (2021) menyatakan hasil penelitiannya hubungan antara pembangunan keuangan dan *shadow economy* menunjukkan hubungan non-linear atau hubungan berbentuk U terbalik dalam jangka panjang..

Selain pembangunan keuangan, penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yang diduga mempengaruhi *shadow economy*, yaitu pensiun, pengangguran, urban populasi, dan GDP. Variabel pensiun digunakan karena perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya rasio penduduk lanjut usia terhadap penduduk usia produktif dapat meningkatkan beban pensiun, pengeluaran jaminan sosial pemerintah, dan dapat berpotensi meningkatkan tekanan fiskal sehingga akan adanya kenaikan pajak atau iuran social. Pada akhirnya dapat mendorong sebagian pelaku ekonomi beralih ke sektor informal untuk mengurangi beban tersebut (Buehn & Schneider, 2012). Variabel pengangguran digunakan karena meningkatnya pengangguran dapat mendorong individu untuk mencari alternatif pendapatan di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga memperbesar *shadow economy* (Tran, 2021). Urban populasi digunakan karena laju urbanisasi yang tinggi berpotensi meningkatkan *shadow economy* apabila pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk perkotaan, sehingga sebagian tenaga kerja beralih ke sektor informal sebagai sumber mata pencaharian (Elgin & Oyvatt, 2013). Sementara itu, GDP digunakan karena tingkat pendapatan yang lebih tinggi umumnya mencerminkan kualitas lembaga yang lebih baik dan sistem ekonomi yang lebih formal, sehingga dapat menekan *shadow economy* (Medina & Schneider, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, masih terdapat *research gap* mengenai hubungan pembangunan keuangan dan *shadow economy*. Terdapat *evidence gap* yaitu adanya perbedaan hasil temuan penelitian hasil penelitian Afful, Bentum-Ennin, et al. (2025) dan Abu-Lila et al. (2021) menunjukkan temuan yang berbeda, sehingga hubungan antara pembangunan keuangan dan *shadow economy* masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Selain itu, terdapat *knowledge gap* yaitu telah banyak penelitian yang meneliti mengenai hubungan *shadow economy* dengan pembangunan keuangan secara agregat, akan tetapi untuk melihat hubungan antara *shadow economy* dan pembangunan keuangan dengan menggunakan tiga aspek indikator lembaga keuangan yakni akses, kedalaman, dan efisiensi lembaga keuangan masih sangat terbatas, khususnya di negara ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan beberapa *novelty*, yakni indeks pembangunan keuangan yang digunakan ada tiga indikator yaitu akses lembaga keuangan, kedalaman lembaga keuangan dan efisiensi lembaga keuangan sebagai *proxy* dari indeks pembangunan keuangan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 negara ASEAN. Serta periode yang digunakan dari tahun 1993 hingga 2024 yang relatif panjang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *shadow economy* masih menjadi tantangan yang cukup besar di negara-negara ASEAN meskipun pembangunan keuangan terus mengalami perkembangan. penelitian mengenai *shadow economy* telah banyak dilakukan, kajian yang membahas hubungan antara pembangunan keuangan dan *shadow economy* di negara-negara ASEAN masih relatif terbatas. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan keuangan memiliki peran dalam menekan *shadow economy*, namun hubungan tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam. penelitian

yang mengkaji pengaruh pembangunan keuangan dengan menggunakan tiga indeks lembaga keuangan terhadap *shadow economy* di negara-negara ASEAN masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembangunan keuangan terhadap *shadow economy* di negara-negara ASEAN dengan judul “Pembangunan Keuangan dan *Shadow economy*: Bukti dari 10 Negara ASEAN Tahun 1993-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah akses lembaga keuangan (*financial institution access*) mampu menekan *shadow economy* di negara ASEAN?
2. Apakah kedalaman lembaga keuangan (*financial institution depth*) mampu menekan *shadow economy* di negara ASEAN?
3. Apakah efisiensi lembaga keuangan (*financial institution efficiency*) mampu menekan *shadow economy* di negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh akses lembaga keuangan terhadap *shadow economy* di negara ASEAN.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kedalaman lembaga keuangan terhadap *shadow economy* di negara ASEAN.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh efisiensi lembaga keuangan terhadap *shadow economy* di negara ASEAN.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang pengaruh pembangunan keuangan terhadap *shadow economy*, khususnya di kawasan ASEAN. Dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam memahami peran pembangunan keuangan terhadap *shadow economy*. Serta memberikan gambaran dan literatur bagi pembaca khususnya dalam bidang ekonomi moneter.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi atau masukan bagi pemerintah dan otoritas keuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, bagi lembaga keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan, serta bagi masyarakat dalam memahami pentingnya integrasi keuangan formal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.